

ANALYSIS OF LOCAL SELF-SUFFICIENCY AND FACTORS INFLUENCE THE REGIONAL INDEPENDENCE

An Empirical Review in Municipal and Regency in Sumatera

Siti Rahmi, Neva Novianti, Dandes Rifa, Erni Febrina Harahap

Bung Hatta University

¹⁾sitirahmi@bunghatta.ac.id/rahmi.iem@yahoo.com, ²⁾nevanovianti4gmail.com

³⁾Dandesrifaziohr@gmail.com, ⁴⁾erni_fh@yahoo.co.id

Abstract : *This research aimed to provide empirical proof on local self-sufficiency after implementation of local autonomy. Regional autonomy aims to improve the welfare of the people in the region and equitable development. Variables tested in determining local self-sufficiency were those having significant effect reflecting the local self-sufficiency. Sample was taken using purposive sampling technique. This research consisted of 55 municipalities and regencies in Sumatera. Statistic method used to test hypothesis was classical assumption test and multiple-regression. Results indicated that PAD, balancing fund, local revenue and other legal revenues affect significantly, but balancing fund still have strong influence on local financial management (62.7%). Therefore, local self-sufficiency has not been maximally realized.*

Keywords: *Local autonomy, local self-sufficiency, PAD, balancing fund, other legal revenue, classical assumption test, multiple-regression*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang kemandirian daerah setelah implementasi otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan dan pembangunan yang merata. Variabel yang diuji dalam menentukan swasembada lokal adalah mereka yang memiliki efek signifikan yang mencerminkan swasembada lokal. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini terdiri dari 55 kota dan kabupaten di Sumatera. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji asumsi klasik dan regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa PAD, dana perimbangan, pendapatan lokal dan pendapatan legal lainnya mempengaruhi secara signifikan, tetapi dana perimbangan masih memiliki pengaruh kuat pada manajemen keuangan lokal (62,7%). Karena itu, swasembada lokal belum terealisasi secara maksimal.

Kata Kunci: Otonomi daerah, swasembada daerah, PAD, dana perimbangan, pendapatan legal lainnya, uji asumsi klasik, regresi berganda

A. PENDAHULUAN

Cita-cita otonomi daerah dinyatakan di negara Indonesia melalui konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan konstitusi tersebut beserta penjelasannya memberi gambaran adanya kaitan antara otonomi daerah dengan bentuk negara kesatuan, yaitu pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah kebijakan meletakkan titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II. Itu baru dianut pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang penjabarannya diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat II, dalam Undang-undang ini dikemukakan bahwa titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II mengandung arti bahwa sebagian besar dari jumlah jenis urusan otonomi berada pada Daerah Tingkat II untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintaha yang bersifat

sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda di berbagai daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi dengan sedikit rasa khawatir dan was-was.

Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah. Sasaran pembangunan daerah yaitu: berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Pemerintah Kabupaten/Kota; meningkatnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah; dan makin terkoordinasi pembangunan antarsektor dan antardaerah serta antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah (Sumodiningrat, 1997:1). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran-serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu Undang- Undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota dengan prinsip bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi adalah penyerahan tanggung jawab antar berbagai tingkatan pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perubahan sistem pemerintahan dari yang sentralistik menjadi desentralistik menjadi tuntutan yang tidak terhindarkan.

Kemandirian Daerah

Secara umum, kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kemandirian daerah akan semakin berperan dan semakin penting. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Kemandirian daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran atau kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran rutinnya dan masih mampu membiayai pengeluaran pembangunan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Halim, 2002:128) sebagai berikut :

100% x Pinjaman dan insi Pusat/Prop Pemerintah Bantuan Daerah Asli Pendapatan KKD Rasio = Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002a), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Mamesah, 1995). Seiring dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 164 ayat 1, Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah (Ibid : 107).

Kapasitas Fiskal

Merupakan suatu komponen yang masuk di dalam formula penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU itu sendiri adalah salah satu komponen di dalam Dana Perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas FORMULA dengan konsep Kesenjangan Fiskal (*Fiscal Gap*) yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*) dengan Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*). DAU bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah *horizontal imbalances* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (*block grants*). Konsep dasar formulasi DAU sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 1999 itu secara implisit merupakan penjabaran dari teori *governmental transfer* yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*.

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Kemandirian daerah dan pendapatan asli daerah

Adanya undang-undang otonomi no.33 tahun 2000 pasal 5, menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk menggunakan sumber-sumber pendaptan asli daerahnya secara optimal seperti pajak dan retribusi daerah guna mewujudkan kemandirian ekonomi. Alisjhabana (2000), meneliti tentang implikasi otonomi terhadap mobilisasi pendapatn asli daerah di Indonesia, variable yang diteliti meliputi :Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan PDRB dengan alat analisisnya ,kontribusi PAD

terhadap APBD dan ratio PAD terhadap PDRB. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang positif dalam penyelenggaraan otonomi daerah seiring dengan kebutuhan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah termasuk pembangunan daerah.

Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan PAD sehingga daerah benar-benar menjadi otonom. Sedangkan selama tahun 2001-2003 peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya PAD terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pusat melalui dana perimbangan (Mahi, 2005)

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

Hipotesis 1 :

Ha 1 : PAD berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal sebagai pencerminan tingkat kemandirian daerah

Kemandirian daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat

Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (Ehtisham, 2002) Dana perimbangan terbagi menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Melalui kebijakan bagi hasil Sumber Daya Alam yang dimiliki. Sedangkan DAK bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dengan adanya wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka menyebabkan adanya persaingan antar daerah. Hal ini dapat terlihat ketika suatu daerah yang kaya dapat memaksimalkan perpajakan. Sedangkan untuk daerah miskin, tidak dapat memaksimalkan perpajakan.

Guna mengatasi adanya ketimpangan antar daerah, maka pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan operasional. Selain dana perimbangan, pinjaman daerah penerimaan lain-lain yang sah juga diharapkan dapat bertindak sebagai acuan dan memberikan kontribusi terhadap daerah

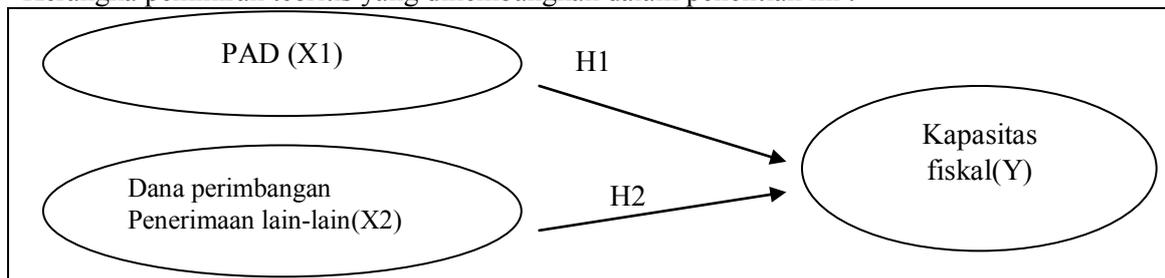
Pengembangan hipotesis

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

Hipotesis 2 :

Ha 2 : Dana perimbangan, penerimaan daerah, penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal sebagai pencerminan kemandirian daerah

Kerangka pemikiran teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini :



C. METODA PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dengan tujuan tertentu (Cooper & Emory, 1995) dan metoda penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.

1. Rasional yaitu penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia
2. Empiris yaitu cara yang digunakan dapat diamati dengan indra manusia
3. Sistematis yaitu proses penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Populasi dan Sampel penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Sedangkan menurut Sekaran (2006) populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa atau hal yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah APBD Pemerintah daerah kota dan kabupaten di pulau Sumatera.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono). Sedangkan menurut Sekaran (2006) sampel adalah sub kelompok populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kota dan kabupaten di pulau Sumatera. Pemilihan sampel akan digunakan metoda purposive sampling method yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono).

Metoda Pengambilan Data

1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota yang sudah ada pada periode pengamatan di beberapa propinsi di Pulau Sumatera.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari situs internet www.depkeu.go.id, www.bpk.go.id dan www.bps.go.id. Data tersebut merupakan data realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di propinsi Sumatera. Periode anggaran pada era otonomi daerah yaitu tahun anggaran 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Metoda pengambilan sampel

Metoda pengambilan sampel (sampling) yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metoda time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu (M.A, Suprananto J, 1992)

Alat Analisis

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan regresi sederhana. Analisis regresi merupakan teknik yang digunakan untuk mengembangkan persamaan dan memberikan perkiraan.

Selain untuk mengukur hubungan antara variable dependen dan variable independen dalam penelitian ini, analisis regresi juga ditunjukkan untuk mengetahui arah hubungan antara variable tersebut. Hasil analisis regresi ini akan berupa koefisien masing-masing variable independen (Ghozali, 2006). Persamaan regresi tersebut yang akan digunakan untuk menguji hipotesis yang ada:

$$Kf = c + \alpha_1 PAD + e$$

$$Kf = c + \alpha_2 Daimb + \alpha_3 Pnrlain + e$$

Keterangan :

Kf : kapasitas fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Daimb : Dana Perimbangan

Pnrlain : penerimaan lain-lain yang sah

C : Konstanta

α_1 : Koefisien regresi untuk dana perimbangan

α_2 : Koefisien Regresi untuk Penerimaan lain-lain yang sah
 e : error term

Uji asumsi klasik

Data yang digunakan sebagai model regresi dalam menguji hipotesis nanti harus menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik.

Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variable atau residual memiliki distribusi normal.

Uji autokorelasi

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem korelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2006).

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicion	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No desicion	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi antara variable dependen.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan lain tetapp, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas

Pengujian hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menguji signifikansi (pengaruh nyata) variable independen (xi) terhadap variable dependen (y) dengan menggunakan uji statistic t (t-test) yaitu membandingkan t hitung dengan t table dengan alfa = 5%

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pengujian penelitian ini meliputi statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, regresi, uji hipotesis dan analisis hipotesis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 kota dan kabupaten di Pulau Sumatera yang datanya diambil dari APBD yang dipublikasikan pada web BPK periode 2005-2010.

Statistik Deskriptif

Analisis yang pertama dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis deskriptif terhadap data-data yang ada. Dari analisis ini akan diperoleh nilai mean (rata-rata), standar deviasi. Tabel 4.1 menunjukkan statistic deskriptif dari 55 kota dan kabupaten yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Tabel 4.1

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
LnY Kapasitas Fiskal	24.8737	.69241	55
LnX1 Pendapatan Asli Daerah(PAD)	23.4040	.80413	55

Tabel 4.2

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
LnY Kapasitas Fiskal	24.8700	.69822	55
LnX2 Dana perimbangan	26.5340	.42225	55
LnX3 Penerimaan lain lain	22.4408	.89711	55

Berdasarkan table 4.1 diketahui bahwa besarnya mean untuk variable dependen KF (Kapasitas fiskal) dengan jumlah n 55 adalah 24.8737, standar deviasi 0,69241. Nilai mean variable independen PAD adalah 23.4040, standar deviasi 0,80413.

Sedangkan pada table 4.2 diketahui bahwa besarnya mean untuk variable dependen KF (Kapasitas fiskal) adalah 24.8700, standar deviasi 0,69822. Nilai mean variable independen Dimb (Dana Perimbangan) adalah 26.5340, standar deviasi 0,42225, sedangkan nilai mean variable independen Pnrlain (Penerimaan lain-lain yang sah) adalah 22.4408, standar deviasi 0,89711.

Uji Asumsi Klasik

Penggunaan alat statistic regresi berganda mensyaratkan dilakukannya pengujian asumsi klasik. Apabila asumsi klasik tidak terpenuhi akan menyebabkan bias pada hasil penelitian. Asumsi klasik yang perlu diuji adalah, multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji korelasi antar variable independen dalam model regresi. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen (Ghozali, 2006). Gejala multikolinieritas dapat dilihat pada nilai VIF dan nilai *tolerance* dalam suatu model. Suatu model dapat dikatakan baik apabila nilai *tolerance* kurang dari 0,1 atau sama dengan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih besar dari 10. Hasil uji multikolinieritas hipotesis 2 dapat dilihat pada table 4.3

Tabel 4.3

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.266	5.495		1.140	.259		
	LnX2 Dana perimbangan	.627	.221	.379	2.836	.006	.876	1.141
	LnX3 Penerimaan lain lain	.088	.104	.113	.848	.400	.876	1.141

a. Dependent Variable: LnY Kapasitas Fiskal

Dari table 4.3 dapat dilihat pada table diatas dimana nilai *tolerance* bernilai dibawah 0,10. Nilai *Tolerance* Daimb adalah 0,876 yang berarti tidak ada korelasi antar variable independen yang nilainya lebih dari 95%. Nilai VIF tidak ada yang melebihi nilai 10, Nilai VIF Daimb, Pnrlain adalah 1,141. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk hipotesis 2 bebas dari masalah multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Hasil pengujian autokorelasi disajikan dalam pada tabel 4.4

Tabel 4.4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.432 ^a	.187	.155	.64172	2.143

a. Predictors: (Constant), LnX3 Penerimaan lain lain, LnX2 Dana perimbangan

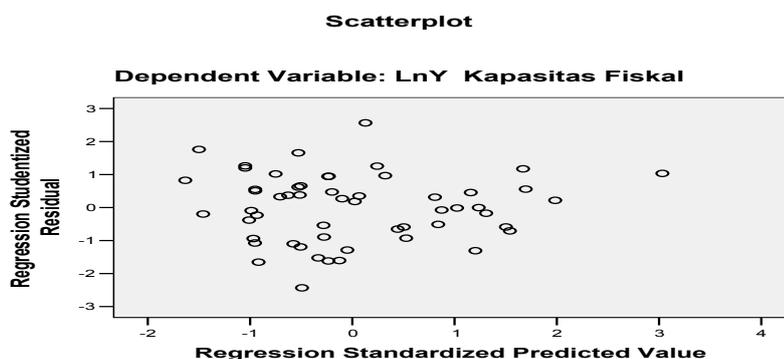
b. Dependent Variable: LnY Kapasitas Fiskal

Nilai DW sebesar 2,143 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 0,05. Untuk jumlah sampel 55 dan jumlah variable independen k=2 maka diperoleh nilai dl =1,490 dan du= 1,641 Oleh karena nilai DW 2,143 lebih besar dari batas atas (du= 1,641) dan kurang dari 4-du=4-1,641 = 2,359 maka dapat disimpulkan tidak terdapat problem autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kondisi heteroskedastisitas sering terjadi pada data cross section karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran yaitu kecil, sedang, dan besar (Ghozali,2006) Dengan pengolahan data SPSS, hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 4.1



Dari uji Grafik Scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak ada problem heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi, variable terikat dan variable terikat dan variable bebasnya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal(Ghozali,2005) Melalui tampilan grafik histogram, diketahui bahwa pola distribusi data tidak normal, sehingga perlu mengeliminasi data-data outlier- nya sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian menjadi 55 kota dan kabupaten di pulau Sumatera

Uji Normalitas Residual

Setelah mengeliminasi data-data outlier, kemudian dilakukan uji normalitas residual dengan uji statistic non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S) .Data akan terdistribusi secara normal jika signifikansinya lebih dari 0,05 Hasil pengujian normalitas residual disajikan dalam tabel 4.5

Tabel 4.5

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		(Error Term)
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000
	Std. Deviation	.62972
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.049
	Negative	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		.616
Asymp. Sig. (2-tailed)		.842

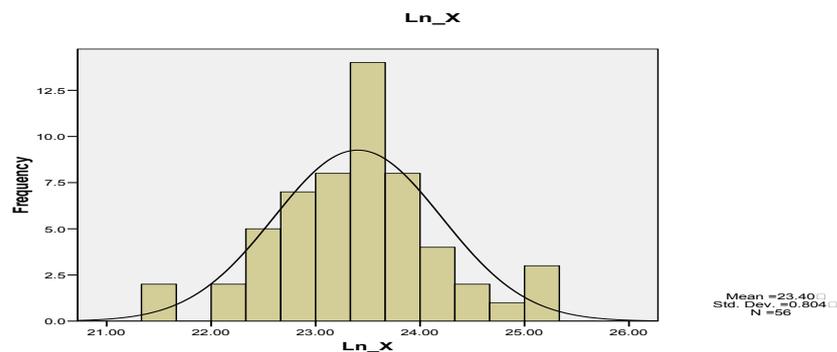
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil pengujian menunjukkan angka signifikan sebesar 0,842 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data telah berdistribusi normal.

Uji Normalitas dengan Grafik Histogram

Gambar 4.2



Grafik histogram tidak menceng ke kanan atau ke kiri, hal ini menggambarkan bahwa data berdistribusi normal.

Pengujian Hipotesis

4.3.1 Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal. Hipotesis ini diuji dengan analisis regresi. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Kf = c + \alpha_1 PAD + e$$

Hasil pengujian regresi dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variable independen disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8

ANOVA^b

Model		SumofSquares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.318	1	4.318	10.575	.002 ^a
	Residual	22.050	54	.408		
	Total	26.369	55			

a. Predictors: (Constant), LnX1 Pendapatan Asli Daerah(PAD)

b. Dependent Variable: LnY Kapasitas Fiskal

Hasil pengujian ini berhasil mendukung hipotesis 1, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari α yang ditetapkan ($\alpha=0,05$)

Bukti empiris tersebut berhasil mendukung hipotesis 1 bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi Kapasitas Fiskal yang diperoleh suatu daerah.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.718	2.509		6.663	.000
	LnX1 Pendapatan Asli Daerah(PAD)	.348	.107	.405	3.252	.002

a. Dependent Variable: LnY Kapasitas Fiskal

Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah diperoleh sebesar 0,348. Hal ini variasi pendapatan daerah yang dapat dijelaskan oleh pengaruh Pendapatan Asli Daerah sebesar 34,8 %.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan kegiatan ekonomi menuju ke arah yang lebih baik sehingga terjadi kemakmuran dan kemandirian daerah. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya dari adanya peningkatan PAD.

4.3.2 Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis 2 menyatakan bahwa Dana Perimbangan, penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal. Hipotesis ini diuji dengan analisis regresi. Model Analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Kf = c + \alpha_2 Daimb + \alpha_3 Pnrlain + e$$

Hasil pengujian regresi dengan Dana perimbangan, penerimaan lain-lain yang sah sebagai variable independen disajikan pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9

ANOVA^b

Model		SumofSquares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.912	2	2.456	5.964	.005 ^a
	Residual	21.414	52	.412		
	Total	26.326	54			

a. Predictors: (Constant), LnX3 Penerimaan lain lain, LnX2 Dana perimbangan

b. Dependent Variable: LnY Kapasitas Fiskal

Hasil pengujian ini berhasil mendukung hipotesis 2, artinya dana perimbangan dan penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal yang ditunjukkan dengan signifikansi 0,005 lebih kecil dari α yang ditetapkan ($\alpha=0,05$)

Bukti empiris tersebut berhasil mendukung hipotesis 2 bahwa Dana Perimbangan, penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan, penerimaan lain-lain maka semakin tinggi Kapasitas Fiskal suatu daerah.

Untuk hasil hipotesis 2 menunjukkan hal yang sama yaitu :

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.266	5.495		1.140	.259		
	LnX2 Dana perimbangan	.627	.221	.379	2.836	.006	.876	1.141
	LnX3 Penerimaan lain lain	.088	.104	.113	.848	.400	.876	1.141

^a. Dependent Variable: LnY Kapasitas Fiskal

Nilai koefisien variable dana perimbangan diperoleh sebesar 0,627. Hal ini menunjukkan variasi pendapatn kapasitas fiskal daerah yang dapat dijelaskan oleh pengaruh dana perimbangan sebesar 62,7 %. Sedangkan nilai koefisien variable penerimaan lain-lain yang sah diperoleh sebesar 0,088. Hal ini menunjukkan variasi kapasitas fiskal daerah yang dapat dijelaskan oleh pengaruh dana penerimaan lain-lain yang sah sebesar 8,8 %.

E. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

KESIMPULAN

Penelitian ini telah dapat membuktikan secara empiris pengaruh PAD terhadap kapasitas fiskal namun hasilnya belum memuaskan untuk menciptakan kemandirian daerah.. Berdasarkan hasil pengujian dan analisisnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal. Yaitu hasil dari penelitian yang menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,002 .Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan yang diterima pemerintah daerah.
2. Dana Perimbangan, penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal. Hipotesis ini diuji dengan analisis regresi. Hasil pengujian ini berhasil mendukung hipotesis 2, artinya dana perimbangan dan penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal yang ditunjukkan dengan signifikansi 0,005 lebih kecil dari α yang ditetapkan ($\alpha=0,05$)

Persentase dari hasil penelitian yaitu persentase Dana perimbangan sebesar 62,7 % merupakan jumlahnya yang sangat besar daripada mengupayakan peningkatan pendapatan sendiri. Pemberian Dana Perimbangan yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, semakin bergantung pada pemerintah pusat

SARAN DAN IMPLIKASI

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting terkait dengan kebijakan pemberian Dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah saat ini. Kebijakan pemberian transfer diindikasikan tidak mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal, tetapi

justru sebaliknya. Daerah menunjukkan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap pemerintah pusat. Kemandirian daerah yang menjadi tujuan otonomi daerah justru semakin jauh dari harapan. Pemerintah pusat perlu memformulasi kebijakan pemberian Dana yang benar-benar dapat menjadi insentif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah .

Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, maka yang perlu diperhatikan adalah :

1. Menambah jumlah sampel yang digunakan untuk meningkatkan daya generalisasi dan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik
2. Menambah rentang waktu pengamatan sehingga data semakin valid
3. Menguji pengaruh komponen-komponen dana perimbangan seperti DAU, DAK bagi hasil serta variable lain terhadap PAD dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, SE, “*Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Pelaksanaan Otoda*”, tahun 2003.
- DJPKPD, “*Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001 – 2003*”, tahun 2004.
- DJPKPD, “*Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*”, tahun 2004.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*. Semarang : BP Undip
- Haryanto, Joko Tri. 2003. *Potret PAD dan relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah*
- Heryawan, Tepas Ahmad. 2009. *Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat Masih Tinggi*
- Ismail, Munawar “*Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah*”, 2002.
Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
- _____ 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- _____ 2007. *Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi*. The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. Economic Development and Cultural Change. Chicago. Vol 49. Hal : 1 – 21.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*.: Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat.
- Sidik, Dr. Machfud MSc, “*Implementasi UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*”, Jakarta 2002.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran?*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Shamsub, Hannarong., Joseph B Akoto. 2004. *State and Local Fiscal Structures and Fiscal Stress*. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Vol 16, No 1 Hal: 40-61.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002.
- Stine, William. 1994. *Is the Local Government Revenue Response to Federal Aid*

- Symmetrical ? Evidence From Pennsylvania County Government in an Era of Retrenchment.* National Tax Journal 47. No. 4. Hal : 799-816
- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity.* Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. Hal : 413 – 423
- Wong,Christine P.W .1991.*Central-Local Relations in an Era of Fiskal Decline :The Paradox of Fiskal in Post –Mao China*
- _____,Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- _____,Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*